

BAB III

PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

Partai Komunis Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks di Indonesia. Didirikan pada tahun 1920, PKI awalnya berfokus pada pertumbuhan gerakan buruh dan kelas pekerja, serta perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Pada awalnya, PKI berjuang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia, dan memiliki dukungan yang signifikan dari para pekerja, petani, dan kelompok masyarakat lainnya. Selama masa penjajahan oleh Belanda, PKI terlibat dalam perlawanan terhadap kekuasaan Belanda namun pemberontakan ini dapat di redam oleh pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka di karena kebebasan membentuk partai politik PKI muncul kembali di Indonesia. Seperti sebelumnya PKI melakukan pemberontak yang terjadi di Madiun tahun 1948. Pada tahun 1965, PKI kembali melakukan aksi pemberontakan di Indonesia kali ini PKI terlibat dalam Gerakan 30 September yang mencoba menggulingkan pemerintahan Soekarno. Kejadian ini mengakibatkan pembunuhan beberapa jenderal tinggi di angkatan darat. Pada Bab ini akan membahas Sejarah PKI di Indonesia hingga pemberontakan PKI tahun 1965.

A. Sejarah Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan suatu gerakan sosial politik yang menjadi ancaman bagi negeri ini. Partai tersebut menganut ideologi Marxisme-Komunisme. Meletusnya peristiwa Madiun merupakan salah satu usaha dari ideolog sosialis kiri untuk mewujudkan Negara Komunis Indonesia. (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. 1994) Embrio dari Partai Komunis Indonesia adalah *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) yang didirikan oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (Parakriti T. Simbolon, 1956).

Sneevliet datang ke Jawa pada tahun 1913 dan menjadi sekretaris perkumpulan pedagang. Melalui *Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel* (VSTP) ia menanamkan paham sosialis, kemudian di tahun 1914 di Semarang didirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) yang bertujuan untuk menyebarkan paham Marxis. (A. K. Pringgodigdo, 1984).

SI cabang Semarang memperoleh pengaruh ISDV melalui Semaoen, yang pada tahun 1918 masuk dalam pengurus besar SI. Perkembangan ini mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Sari³⁶ Islam pada tahun 1921. Pada tahun 1921 kaum kiri, yang telah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbentuk pada tahun 1920, dikeluarkan dari Sarekat Islam. Di daerah hal ini juga

mengakibatkan perpecahan yang hebat terjadi dalam Sarekat Islam (SI). Periode sesudah tahun 1921 sampai pecahnya Perang Dunia Kedua memperlemah Sarekat Islam (A.P.E. Korver, 1985).

1. Pemebrontakan PKI Tahun 1926

Keberhasil Partai Komunis Indonesia menempatkan dirinya sebagai partai terbesar, PKI mulai merasa dirinya kuat untuk melancarkan suatu petualangan yang akan membawa malapetaka bagi ribuan patriot Indonesia. Petualangan itu adalah apa yang dikenal dengan nama "Pemberontakan 1926" Pemberontakan itu dirancang oleh pemimpin pada waktu itu, tetapi pada saatnya meletus, pemimpin pemimpin itu tidak di tempat. Pemimpin-pemimpin itu adalah Sardjono, Budi Sutitro, Sugono, dan lain-lain. Dalam masa persiapan, jelas bahwa hanya sebagian di antara jumlah cabang-cabang yang setuju dengan pemberontakan, sedangkan sisanya merasa bahwa PKI belum mampu untuk mengadakan pemberontakan. Di samping itu, ada tokoh PKI lainnya, yaitu Tan Malaka, yang waktu itu bertugas selaku wakil Komintern di Asia Timur yang menganggap bahwa pemberontakan itu tidak mungkin berhasil karena massa belum siap. Akan tetapi, Alimin tetap meneruskan persiapan-persiapan ke arah pemberontakan (Poesponegoro, dkk, 2010).

Pemberontakan PKI 1926 hingga 1927 tidak hanya terjadi di pulau Jawa sebagai tempat titik awal kemunculan PKI. Pemberontakan ini muncul di berbagai daerah di luar pulau Jawa. Pemberontakan yang terjadi sempat membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda naik pitam. Dari hal itu juga sebenarnya menggambarkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda kecolongan dengan berkembangnya partai Komunis di Indonesia.. Pada akhirnya, pemberontakan meletus pada tanggal 13 November 1926 di Jakarta, disusul dengan tindakan-tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam waktu satu hari pemberontakan di Jakarta telah ditumpas dan dalam waktu satu minggu di seluruh Jawa. Di Sumatra Barat baru pada tanggal 1 Januari 1927 pemberontakan meletus, tetapi dalam waktu tiga hari sudah dapat ditindas oleh pemerintah Belanda. (Dwiki Anugrah Gustiawan Putra Hatama, . 2022: 69).

2. Pemebrontakan PKI di Madiun

Madiun affair adalah suatu peristiwa sejarah revolusi Indonesia yang terjadi pada bulan September sampai dengan Desember tahun 1948 di karesidenan Madiun. Peristiwa Madiun merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Karena peristiwa Madiun merupakan suatu revolusi sosial yang memiliki ciri khas. Kehebohan dan gencarnya peristiwa Madiun tahun 1948, bisa juga disamakan dengan peristiwa Kamboja ketika rezim Khmer Merah berkuasa kedua

peristiwa ini sama-sama menggetarkan dan mengerikan (Tim Penyusun Jawa Pos, 1990).

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi “ kebebasan membentuk partai politik beserta laskarnya”. Dalam bukunya (Suratmin 2012 : 4) menjelaskan

Dengan adanya kebijakan ini Indonesia memasuki pergejolakan partai politik baru seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masumi) Partai Buruh Inonesia, Partai Rakyat Jakarta, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, PNI. Kebijakan dalam kebebasan membentuk partai, tampaknya membuat PKI mulai muncul kembali di Indonesia.

Pemberontakan PKI di Madiun bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi merupakan pemberontakan untuk yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh kaum komunis Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ini merupakan lanjutan pemberontakan pada tahun 1926 yang gagal. Pemberontakan ini dipimpin oleh sebagian tokoh yang dulu juga terlibat dalam pemberontakan tahun 1926. Semenjak gagalnya pemberontakan PKI tahun 1926 komunis di Indonesia kemudian menyusun kembali kekuatan konsolidasi partai dengan mengandalkan tokoh-tokoh yang ada (Soetarjono, 2001).

Sejak kedatangan Muso, seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow dan kemudian mengajukan “jalan baru” bagi PKI yang didirikan pada 9 Mei 1914 bersama Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948 oleh kelompok Amir Syarifudin yang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Hatta (Nugroho Notosusanto, 1986).

Basis kekuatan rakyat yang ingin digalang oleh FDR/PKI dalam mewujudkan tercapainya Republik Soviet Indonesia yang berhaluan komunis adalah dengan memanfaatkan kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas tinggal di pedesaan dimana pada umumnya mereka masih diwarnai dengan kultur buta huruf, buta informasi, buta bahasa Indonesia, hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan akibat dari penetrasi budaya oleh Belanda masa lalu serta eksplotasi ekonomi yang dahsyat pada masa pendudukan Jepang. Pada 26 Februari 1948 di Sala Amir membentuk FDR (front demokrasi rakyat) dengan tujuan mempersatukan partai-partai sosial yang berbasis pembela rakyat kecil dan buruh (Moedjanto, 1988).

Peristiwa pemberontakan Madiun berkaitan erat dengan pertikaian antara FDR / PKI sebagai kekuatan politik dengan Masyumi dan PNI. FDR/PKI tidak hanya berhasil mengadu domba golongan proletar yang diwakili petani dan buruh miskin

dengan golongan borjuis yang diwakili elite birokrasi priyayi. Tetapi juga berhasil menimbulkan pertentangan antara polisi dan penjahat, santri dengan kiai (Tim Penyusun Jawa Pos, 1990).

B. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Tahun 1965

Demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-1959 memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan. Alimin menghidupkan kembali PKI pada tanggal 4 Februari 1950. Akan tetapi, kepemimpinan Alimin ini tidak berjalan lama karena pada bulan Juli 1950 D.N. Aidit yang melarikan diri ke luar negeri akibat pemberontakan PKI-Madiun kembali lagi ke Indonesia. Tindakan D.N. Aidit pertama ialah menyatukan kembali seluruh potensi partai. Setengah tahun kemudian D.N. Aidit berhasil mengambil alih kepemimpinan PKI dan mengintensifkan propaganda untuk merehabilitasi nama PKI dengan mengeluarkan Buku Putih tentang Pemberontakan Madiun (Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1992).

Pada masa demokrasi liberal PKI dapat dikatakan menemukan dirinya kembali serta bangkit dari "kematian" singkatnya pasca pemberontakan di Madiun 1948. Pada masa ini, PKI mampu mensejajarkan dirinya dengan partai-partai besar lainnya. Bahkan PKI termasuk salah satu dari empat partai besar pada saat itu setelah PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan PKI dalam mengembangkan dirinya tidak terlepas dari taktik dan propaganda para pimpinan PKI. Kesadaran bahwa untuk dapat menjadi nomor satu tidaklah cukup dengan basis massa yang besar, namun juga harus didukung dengan kemampuan berpolitik dan dengan kecerdikan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jalan parlemen pun ditempuh, dan untuk dapat duduk dalam pemerintahan, maka PKI harus mampu menarik simpati rakyat. Akal yang cerdas digunakan dengan melakukan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting (Muhammad Rusli Karim, 1989).

Puncaknya ketika Pemilu tahun 1955, di mana PKI unggul dengan enam juta suara. Ini adalah suatu prestasi besar yang diperoleh partai yang sebelumnya sempat mati suri tersebut. Walaupun di dalam pemilu PKI unggul dan termasuk dalam empat partai besar, namun PKI gagal duduk dalam kabinet yang terbentuk. Presiden Sukarno yang dari awal sudah menaruh simpati yang besar pada PKI dan menginginkan agar PKI diikutsertakan dalam kabinet, dengan pertimbangan bahwa PKI berhasil mengumpulkan suara yang cukup besar dalam pemilu. Namun usaha Presiden Sukarno tersebut tidak berhasil. Pengaruh NU dan

Masyumi cukup mampu menjegal masuknya PKI dalam kabinet. Kabinet yang terbentuk itu dinamakan Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Eric A. Nordlinger, 1990).

Gagalnya PKI untuk masuk dalam kabinet tersebut tidak berarti bahwa PKI akan berhenti sampai di situ, bukan juga berarti bahwa PKI telah kehabisan peluang dan kesempatan. Berpisahnya Dwi Tunggal Sukarno-Hatta pada tahun 1956 telah memberi angin segar dan peluang yang sangat menguntungkan bagi PKI, karena PKI akan semakin leluasa untuk mendekati Presiden Sukarno. Usaha PKI ini memang tidak sia-sia. PKI menjadi dekat dengan Soekarno, puncaknya ketika PKI memberikan dukungan penuh. Ketika Presiden Sukarno mengemukakan konsep yang kemudian dikenal dengan konsep Demokrasi Terpimpin, dengan alasan untuk menyelamatkan negara dari perpecahan karena banyak terjadi ketegangan-ketegangan politik pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo II. PKI mendukung penuh konsep tersebut dan kemudian duduk dalam Kabinet Gotong-Royong yang dibentuk oleh Presiden Sukarno walaupun banyak kalangan yang menentang (Eric A. Nordlinger, 1990).

Menjelang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 pasca Demokrasi Terpimpin, posisi PKI memang baik, karena Presiden Sukarno sangat melindungi PKI. PKI sendiri secara tidak langsung adalah salah satu kekuatan Presiden Sukarno, sehingga membuat TNI AD "antipati" terhadap PKI. Meningkatnya suhu politik saat itu, jelas berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa pengganti Sukarno bila beliau wafat. Saat itu, hanya ada dua kandidat yang sering disebut-sebut, yaitu A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution. Di sisi lain, pihak komunis tidak menginginkan tampilnya pimpinan AD sebagai pengganti Sukarno, karena sebagai pengalaman konfrontasi tajam antara AD dan PKI (Proyek Historiografi Center for Analysis, 2005).

Suhu politik tahun 1965 semakin panas karena jatuh sakitnya Sukarno dan kecemasan PKI jika sewaktu-waktu TNI AD akan mengganyang mereka. Isu sakitnya Sukarno membuat panik kalangan PKI. D.N. Aidit selaku pimpinan PKI terbawa oleh bayangannya sendiri yang mengerikan. Maka untuk menyelamatkan PKI, Aidit berusaha meyakinkan kalangan PKI dengan suatu gagasan bahwa ada Dewan Jenderal di dalam Angkatan Darat yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Adapun Dewan Jenderal itu diduga disponsori oleh CIA, dan oleh karena itu, para Jenderal yang tergabung dalam dewan tersebut harus ditangkap untuk menyelamatkan presiden dan revolusi Indonesia (Ulf Sundhaussen, 1986).

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 kesatuan-kesatuan Resimen Cakrabirawa, yang bertugas mengawal Presiden, melakukan operasi untuk melenyapkan pimpinan puncak Angkatan Darat yang paling menentang derap langkah Indonesia menuju

komunisme. Dalam operasi ini, Yani, Pandjaitan, dan Haryono terbunuh dalam perlawanan terhadap penangkapan, sedangkan Suprpto, Sutoyo, dan Parman diculik dan kemudian dibunuh. Jenderal lain yang diincar menjadi sasaran yang paling utama, Menteri Pertahanan Jenderal Nasution, ia berhasil lolos berkat cepatnya kesimpulan yang diambil istrinya (Green Marshall, 1992).

G-30-S menyatakan keberadaannya untuk pertama kali melalui siaran RRI pusat pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan-pasukan yang setia kepada G-30-S menduduki stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio sekitar pukul 07.15 WIB melakukan pengumuman selama 10 menit yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Suara yang mengelabui dari orang ketiga ini memberi suasana berita yang menentramkan. Seakan-akan para penyiar RRI masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu masuk. Satu-satunya anggota G-30-S yang namanya diumumkan dalam pernyataan pertama itu adalah Letkol Untung. Ia menyatakan diri sebagai komandan batalyon pasukan kawal presiden yang bermaksud mencegah "kup kontra-revolusioner" oleh sebuah kelompok yang dikenal sebagai Dewan Jenderal (Peter Kasenda, 2015).

A. Penumpasan Partai Komunis Indonesia Tahun 1965

Peristiwa G 30 S/PKI mengkitab terjadinya kekosongan pimpinan Angkatan Darat, dalam rapat di Markas Kostrad pada tanggal 1 Oktober disepakati Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto memegang jabatan Pimpinan Sementara Angkatan Darat. Keputusan rapat tersebut sesuai dengan petunjuk dari Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, yang menyebutkan apabila Panglima Angkatan Darat berhalangan, perwira tinggi yang mewakilinya ialah Deputi I/Pangad Mayjen TNI Moersjid atau Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto (Hendro Subroto, Sintong Panjaitan, 2009).

Angkatan Darat (AD), sebagai pemegang mandat pertahanan negara dan pewaris semangat perjuangan melawan penjajah pastinya tidak akan merelakan kekuasaan jatuh ke tangan komunis. Langkah pertama Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) adalah menumpas satuan-satuan bersenjata G30S/PKI (Tribuana Said, D. S. Muljanto, 1983).

Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto bersama staf-stafnya sedang berada di Markas Kostrad dan membaca situasi yang sedang terjadi. Sepanjang hari itu banyak perwira yang berkumpul di Kostrad

sesudah diketahui bahwa disinilah pusat kekuatan militer yang anti Gerakan 30 September (John Roosa, 2008).

Soeharto selaku Panglima Kostrad, dapat menyimpulkan bahwa Letkol. Untung lah yang ada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Karena sewaktu Soeharto menjadi Komandan Resimen Batalyon 444 di Solo, Letkol. Untung berpangkat komandan kompi. Di situlah Soeharto mulai mengenal Untung. Menurut Soeharto bahwa di masa revolusi Letkol. Untung adalah seorang tentara yang dibina dan dididik menjadi kader komunis oleh tokoh PKI yang bernama Alimin (G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, 2003).

Sarwo Edhie di panggil oleh Mayor Jenderal Soeharto ke Markas Kostrad untuk keperluan rencana pengambilalihan. Pertemuan yang kurang lebih berjalan selama satu jam tersebut diputuskan untuk melakukan perebutan obyek Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi, yang didalamnya telah dikuasai Letnan Kolonel Untung dan pengikut-pengikutnya. Selain itu karena satu-satunya media massa yang sangat vital untuk mengikuti perkembangan politik pada waktu itu, hanya RRI Pusat (Hendro Subrot, 2009).

Pasukan RPKAD telah berkumpul di Markas Kostrad dalam posisi siap siaga. Sore hari sekitar pukul 17.00 Sarwo Edhie mendapatkan perintah dari Mayor Jenderal Soeharto untuk mulai melancarkan gerakan perebutan Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi. Jarak tempuh antara Markas Kostrad ke Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi tidak lebih dari 2 km, sehingga gerakan para pasukan RPKAD bisa berjalan cepat. Sarwo Edhie ketika ditanya Mayor Jenderal Soeharto tentang waktu yang diggunakan untuk menduduki Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi, ia langsung menjawab diperkirakan para pasukannya bisa mengambil alih kedua tempat tersebut hanya dalam 20 menit (Peter Kasenda, 2015).

Sekitar pukul 19.20 Gedung RRI berhasil diambil alih oleh Sarwo Edhie dan pasukannya. Kantor Telekomunikasi dalam waktu yang bersamaan juga dapat diambil alih. Kompi Kapten Urip berhasil menguasainya setelah pasukannya berhasil mengalahkan beberapa sukarelawan sipil Gerakan 30 September. Setelah semua kompi melaporkan ke Markas Kostrad bahwa kedua tempat tersebut berhasil direbut, datanglah beberapa perwira RPKAD ke Gedung RRI. Hingga petang hari anggota Gerakan 30 September sudah tidak ada yang tersisa lagi di dalam kota (John Roosa, 2008).

Tragedi politik 1965 yang terjadi membuat , Mayjen TNI Soeharto memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie untuk segera memimpin operasi penumpasan PKI. Selain itu, Soeharto juga membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas

keamanan. Dalam aksinya Kopkamtib menggelar Operasi Kalong dan Operasi Trisula, dimana tentara melakukan penangkapan, penahanan, dan menginterogasi orang-orang yang terindikasi terlibat dalam kegiatan PKI di berbagai tempat (Kurniawan, 2014).

Akibat dari peristiwa tersebut terjadilah penangkapan-penangkapan para anggota PKI. Penangkapan tersebut tak jarang berujung pada penyiksaan bahkan kematian orang yang dicurigai terlibat PKI dilakukan secara sistematis, serempak, dan masif. Pekerjaan itu dilakukan aparat negara, terutama militer, di semua level, baik pusat maupun daerah. Pembersihan gelombang kedua yang terjadi pasca 30 September 1965, dilakukan pada tahun 1968. Upaya penumpasan sisa-sisa G.30.S/PKI merupakan langkah tepat dari pemerintah Indonesia, sebelum kekuatan komunis kembali melakukan gerakan subversif yang dapat membahayakan negara. Pada Pembersihan gelombang kedua di Jawa Timur juga bergerak melakukan penumpasan sisa-sisa G.30.S/PKI yang dilakukan oleh Kodam VIII / Brawijaya, dengan cara melancarkan Operasi Trisula pada Juli tahun 1968 untuk menyapu Blitar selatan sebagai basis PKI. Penumpasan PKI yang dilaksanakan di Blitar selatan merupakan suatu bentuk penanggulangan terhadap bahaya *latent* komunis yang ada di Indonesia (Dwipayana dan Ramadhan, 1989).

D. Segi Pedagogis

Berdasarkan uraian tentang peristiwa pengkhianatan PKI 30 September Tahun 1965 maka nilai moral yang patut kita teladani adalah:

1. Sejarah PKI menggarisbawahi pentingnya adanya ruang bagi berbagai paham politik dalam sebuah negara. Nilai yang dapat diambil adalah perlunya menghormati kebebasan berpendapat dan mengakui bahwa pluralitas politik dapat menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang inklusif.
2. Sejarah PKI juga menyoroti potensi bahaya fanatisme ideologi yang ekstrim. Terdapat peristiwa- peristiwa yang kontroversial seperti Gerakan 30 September 1965 dan pengambilalihan kekuasaan yang melibatkan kekerasan. Nilai yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga keseimbangan dan kritis terhadap ideologi politik demi mencegah eksklusivitas, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Sejarah PKI juga mencerminkan pengaruh politik global dalam perkembangan suatu negara. PKI memiliki hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok pada masa tersebut. Nilai yang dapat diambil adalah pentingnya memahami hubungan internasional dan mempertimbangkan implikasinya dalam politik domestik.

4. Sejarah PKI meninggalkan luka dan traumatisme bagi banyak individu yang terlibat atau yang terkena dampak dari pembersihan dan kekerasan yang terjadi pasca Gerakan 30 September. Nilai yang dapat diambil adalah pentingnya menghormati dan mendukung proses pemulihan, rekonsiliasi, dan penyembuhan bagi individu dan masyarakat yang terdampak.